BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan kesehatan upaya untuk pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan hidup sehat agar terwujud kesehatan yang optimal bagi masyarakat maka diselenggarakan upaya kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan yang di selenggarakan secara terus.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan cukup besar kepada kabupaten/kota termasuk dalam bidang kesehatan, maka peluang Pemerintah Daerah kabupaten/kota cukup besar untuk mengatur sistem kesehatannya termasuk sistem perencanaan.

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah, yang pada awalnya bersifat *top down* (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) sekarang menjadi *bottom-up* (dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat). Otonomi daerah bidang kesehatan memberikan kesempatan yang banyak kepada pemerintah untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, dana, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik.

Ketika otonomi daerah dikaitkan dengan sistem politik yang ada di Indonesia, para bupati/walikota biasanya hanya membuat program jangka pendek yaitu RPJMD, karena lama jabatannya lima tahun, sehingga program kesehatan hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh kepada masyarakat. Padahal jika kita lihat lebih jauh, penyelesaian masalah kesehatan memerlukan waktu yang panjang, yaitu sekitar 10 tahun.Walaupun ada program kesehatan jangka panjang yang direncanakan, namun seperti kita lihat pada kenyataannya, ketika pergantian pemimpin daerah, maka

program pun berganti, dan jika tidak berganti, pasti hanya namanya saja dan melanjutkan program yang sudah berjalan.

Pembangunan kesehatan merupakan proses menuju kearah produktivitas penduduk suatu daerah, semakin banyak penduduk yang sehat, semakin produktif pula suatu daerah. Otonomi kesehatan di bidang kesehatan seharusnya mempunyai visi yang sejajar dengan rencana Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Sehat 2025, dimana salah satu agenda pentingnya adalah perubahan paradigma dari paradigma sakit ke paradigma sehat, yaitu cara pandang, pola pikir, dan model pembangunan kesehatan yang holistik, menangani masalah kesehatan yang dipengaruhi banyak faktor secara lintas sektoral, dan mengarah pada upaya peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan.

Otonomi daerah di bidang kesehatan bertujuan untuk menumbuhkan sifat kebaikan dan adil dalam bidang kesehatan, karena setiap daerah mempunyai kewenangan untuk membuat formulasi baru sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Demikian pula halnya dengan daerah di Kota Padang, dalam melakukan perencanaan pembangunan kesehatan senantiasa perlu memperhatikan perencanaan pembangunan yang dapat mengakomodasi keinginan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Padang itu sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dan tugas perencanaan pembangunan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan kerjasama lintas sektoral, mulai dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas kebersihan, dinas lingkungan hidup, dan dinas-dinas lain.

Pembangunan kesehatan dilaksanankan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu indikator kesejahteraan. untuk mewujudkan tujuan tersebut dituangkan dalam visi pembangunan kesehatan Kota Padang "Mewujudkan Mayarakat Kota Padang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan". Dalam setiap indikator pembangunan kesehatan di usahakan untuk ditampilkan berbagai data dan informasi yang menjawab visi dan misi serta berbagai data dan informasi lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil judul yaitu "Perencanaan Pembangunan Sektor Kesehatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa hal yang akan dibahas pada laporan magang yang berjudul perencanaan pembangunan sektor kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perencanaan pembangunan sektor kesehatan?
2. Apa program pemerintah kota padang dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan?

1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan suatu mata kuliah wajib yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam praktek kerja/magang ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses perencanaan pembangunan sektor kesehatan.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses perencanaan pembangunan.

1.4 Manfaat penulisan

a. Bagi akademik.

   Dapat mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan pada sektor kesehatan pada BAPPEDA Kota Padang.

UNIVERSITAS ANDALAS

b. Bagi Penulis.

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis tentang perencanaan pembangunan pada sektor kesehatan pada BAPPEDA Kota Padang.

c. Bagi Instansi.

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi yaitu BAPPEDA dalam melaksanakan perencanaan pembangunan sektor kesehatan Kota Padang.

1.5 Kegiatan Magang

Pada kegiatan magang ini penulis memilih BAPPEDA Kota Padang dan berharap dengan pemilihan tempat magang ini dapat mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Kegiatan magang ini dilakukan BAPPEDA Kota Padang selama 40 hari.

1.6 Sistematika Laporan Magang

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat penulisan, kegiatan magang dan sistematika laporan magang.

Bab II : Landasan Teori

Menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektor kesehatan.

Bab III : Gambaran Umum

Berisikan tentang gambaran umum mengenai BAPPEDA Kota Padang

Yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran serta susunan struktur organisasinya dan gambaran umum derajat kesehatan kota padang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Bab IV : Pembahasan

Perencanaan pembangunan sektor kesehatan pada bappeda kota padang

Mengemukakan bagaimana proses perencanaan pembangunan sektor kesehatan pada BAPPEDA kota padang dan kegiatan yang dilakukan pemerintah kota padang dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Bab V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan pada pemahaman serta membandingkan dengan apa yang telah diterapkan oleh kantor BAPPEDA kota Padang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA